



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN LANGSUNG PANGAN DAERAH DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI SELAMA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

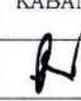
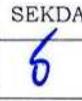
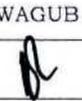
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa implikasi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan perekonomian, dengan fokus pada belanja jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian masyarakat yang terkena dampak;
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin akibat kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. bahwa dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat dan penyediaan bahan pangan, dibutuhkan pemberian bantuan langsung pangan daerah untuk menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat daerah yang terkena dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus*

Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 114/II/III/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Provinsi Gorontalo Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN LANGSUNG PANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI SELAMA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. *Corona Virus Disesase 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bantuan Langsung Pangan Daerah yang selanjutnya disebut BLPD adalah bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data base yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada msing-masing individu dan rumah tangga.
8. Pemberi bantuan adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan program bantuan.
9. Agen Penyalur adalah supplier dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM.

KARO HUKUM	KABAN	ASIS/EN	SEKDA	WAGUB
				

10. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Pangan Daerah yang datanya berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
11. Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut DKPM adalah Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
12. Tim Pendamping Program BLPD Provinsi Gorontalo adalah tim yang anggota, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **6 April** 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **6 April** 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR **10**

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 April 2020

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN LANGSUNG PANGAN DAERAH
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN
EKONOMI SELAMA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*)

PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN LANGSUNG PANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI SELAMA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

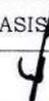
1. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dalam rangka pemberian bantuan langsung pangan daerah adalah :

- 1) Penanggulangan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat terutama masyarakat miskin akibat pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19 sesuai amanah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- 2) Pemberian bantuan langsung pangan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin yang terdampak akibat pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19.
- 3) Pemerintah Daerah hadir ditengah-tengah masyarakat dalam rangka meminimalisir kekhawatiran atas dampak sosial dan ekonomi yang timbul selama pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19.

2. DASAR HUKUM

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- 2) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan , Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19)*.
- 3) Keputusan Pesiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19)*.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)*.
- 6) Instriksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7) Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766).

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Daerah adalah:

- 1) Menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin
- 2) Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga terutama bagi keluarga miskin
- 3) Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terutama bagi masyarakat (UMKM) yang memproduksi bahan pangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan pemberian bantuan pangan ini.

Sedangkan sasaran bantuan pangan daerah adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total sebanyak 53.418 KPM, yang datanya bersumber dari database DTKS, yang terdiri dari:

- 1) Masyarakat miskin yaitu para pengemudi Bentor, Ojek, Pengemudi Angkutan, Pekerja Serabutan, Pedagang Kecil (UMKM), dll yang selama ini memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai Pemerintah Provinsi sebanyak 32.051 atau setara dengan 60% dari total sasaran.
- 2) Pengemudi Bentor, Ojek, Pengemudi Angkutan, Pekerja Serabutan, Pedagang Kecil (UMKM), dll di masing-masing Kabupaten/Kota sebanyak 21.367 atau setara dengan 40% dari total sasaran, diluar KPM yang ditanggung Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berjumlah 32.051 KPM.

4. RUANG LINGKUP DAN PERIODE KEGIATAN

Bantuan Langsung Pangan Daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang melibatkan seluruh Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo dalam pendanaan dan penyaluran Bantuan Langsung Pangan bagi masyarakat miskin yaitu para pengemudi Bentor, Ojek, Pengemudi Angkutan, Pekerja Serabutan, Pedagang Kecil (UMKM), dll di masing-masing Kabupaten Kota.

Sedangkan periode pemberian bantuan langsung pangan daerah adalah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu mulai minggu pertama Bulan April 2020 (menjelang Bulan Ramadhan), satu minggu sebelum lebaran (bulan Mei 2020) dan satu minggu setelah lebaran (Bulan Juni 2020).

5. KRITERIA PELAKSANAAN KEGIATAN

1) Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

- a. Keluarga Penerima Manfaat adalah Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.
- b. Calon penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada poin a, namun tidak masuk dalam DTKS, yang dalam "penilaian" Dinas terkait ikut terdampak, sebagai akibat ditetapkannya siaga darurat covid 19, harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi lapangan dan dipastikan kondisi social ekonominya, sebelum diusulkan untuk menjadi Keluarga Penerima Manfaat diluar data DTKS.
- c. Jumlah total Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 53.418 KPM yang dibiayai melalui APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo sebanyak 32.051 (60% dari total KPM) dan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota sebanyak 21.367 KPM (40% dari total KPM).
- d. Jumlah KPM tersebut pada huruf c, dapat berubah dan menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota
- e. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah masyarakat terdampak COVID-19 yang terdiri dari para pengemudi bentor, ojek, pengemudi angkutan, pekerja serabutan,

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

pedagang kecil, dan lain-lain, yang selama ini menjadi penerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD). Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 112/12/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019 bahwa Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah sebanyak 35.000 KPM dan setelah dilakukan verifikasi jumlah keluarga penerima manfaat pemberian bantuan langsung pangan daerah sebanyak 32.051 KPM. Daftar KPM per Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan, sebagaimana **Lampiran 1.A sd 1.F**

f. Keluarga Penerima Manfaat yang dibiayai oleh Kabupaten/Kota adalah para pengemudi bentor, ojek, pengemudi angkutan, pekerja serabutan, pedagang kecil, dll yang terdampak COVID-19 sebanyak 21.367 KPM. KPM yang akan dilayani oleh Kabupaten/Kota terlebih dahulu harus dilakukan pendataan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

2) Jenis Bantuan dan Nilai Bantuan

Jenis bahan pangan yang dapat disalurkan adalah beras, telur atau ikan, minyak goreng, kemasan atau minyak kelapa, dengan jumlah nilai bantuan per- Kepala Keluarga Penerima Manfaat (KPM) termasuk biaya distribusi dan biaya kemasan/packing sekali pelayanan sebesar Rp178.150,00/sekali penyaluran, sebanyak 3 kali penyaluran.

6. TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1) Penentuan dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

- a. KPM yang menerima bantuan pangan adalah keluarga miskin penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) Provinsi Gorontalo sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 112/12/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019 tentang Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah sejumlah 32.051 ditambah dengan KPM yang menjadi usulan Kabupaten/Kota yang bersumber dari DTKS dan Non DTKS (masyarakat terdampak Covid-19).
- b. Penetapan penerima bantuan sesuai pada poin a, dapat dilakukan perubahan (tambah/kurang) sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dengan tetap memperhatikan ketentuan kuota 60% Provinsi dan 40% Kabupaten/Kota.
- c. Mekanisme perubahan data penerima manfaat dilaksanakan rekonsiliasi data yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk menyandingkan dan konfirmasi data dalam rangka menghindari double penerima, meninggal dunia, pindah, penerima manfaat bansos Kemensos (PKH, BPNT Pusat, dll)
- d. Penerima manfaat Bantuan Pangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

2) Pembiayaan Penyediaan dana

Pembiayaan program bantuan langsung pangan daerah dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah Provinsi dan Kabuapten/Kota dalam bentuk *sharing* pembiayaan, yaitu 60% (enam puluh persen) oleh Pemerintahn Provinsi dan 40% (empat puluh persen) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi menyediakan dana untuk membiayai bantuan pangan dan biaya distribusi bagi 60% dari total KPM melalui APBD Provinsi, sedangkan Kabupaten/Kota membayai 40 % dari total KPM melalu APBD Kabupaten/Kota (diluar dana desa) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- b. Besaran alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai 60% dari total KPM disetiap Kabupaten/Kota akan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur berupa Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten/Kota.
- 3) Transfer Dana Ke Kabupaten Kota
Dana bantuan keuangan khusus bagi Kabupaten/Kota ditransfer dengan persyaratan sebagai berikut:
- Pemerintah Provinsi melakukan transfer dana secara bertahap sesuai tahapan sebagaimana diatur pada ketentuan angka 4.
 - Untuk transfer tahap I Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Provinsi
 - Untuk transfer Tahap II dan III Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Provinsi dan melampirkan Laporan Penyaluran Tahap sebelumnya.
- 4) Pengadaan Bantuan Pangan Bagi Kabupaten/Kota
Pengadaan Bantuan Langsung Pangan Daerah dilakukan dengan mekanisme berikut:
- Dana yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Gorontalo dan dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota hanya digunakan untuk pengadaan bantuan pangan dan biaya distribusi sebagaimana dijelaskan pada angka 5, 2) b. Tabel 1 di atas.
 - Kabupaten/Kota melalui Dinas Teknis terkait bertanggungjawab melakukan proses pengadaan sesuai dengan Peraturan Perundangan tentang pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat, dengan memprioritaskan Bahan Pangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Perka LKPP RI Nomor 13 Tahun 2018, pada lampiran I halaman 5, diuraikan dalam butir 2.1.1 (identifikasi kebutuhan), poin 3(b) "Pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan". Dengan mendorong keterlibatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penyediaan bahan pangan dimaksud.
 - Pengadaan bantuan pangan ini disesuaikan dengan kondisi setempat dengan tidak mengurangi jumlah atau jenis produk dan/atau biaya per paketnya.
- 5) Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah
Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah dilakukan dengan mekanisme berikut:
- Bantuan Langsung Pangan Daerah hanya diberikan kepada KPM yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Pangan Daerah.
 - Penyaluran bantuan pangan sampai ke KPM dilakukan masing-masing Kabupaten/Kota dengan memberdayakan transportasi lokal seperti bentor, ojek, dan angkutan umum. Atas jasa penyaluran tersebut para pengemudi bentor, ojek, dan angkutan umum diberikan biaya distribusi yang besarnya diatur secara teknis dan disepakati oleh penyedia dan pengemudi angkutan (bentor, ojek, angkot dll).
 - Penyaluran Bantuan Pangan didampingi oleh Pendamping PKH.
 - Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah sampai kepada KPM dilakukan dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 (menggunakan masker, menghindari potensi terjadinya kerumunan masa, dll).

KABO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN 1.A. KOTA GORONTALO

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JML KPM	NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JML KPM				
1	KOTA BARAT	1	BULADU	103	3	KOTA TENGAH	1	DULALOWO	30		
		2	BULIDE	149			2	DULALOWO TIMUR	62		
		3	DEMBE I	306			3	LILUWO	61		
		4	LEKOBALO	251			4	WUMIALO	70		
		5	MOLOSIFAT W	49			JUMLAH		223		
		6	PILOLODAA	125			4	KOTA UTARA	1	DEMBE II	76
		7	TENILO	102					2	DEMBE JAYA	132
JUMLAH			1085	3	DULOMO	94					
2	KOTA SELATAN	1	BIAWAO	36	4	DULOMO SELATAN			110		
		2	BIAWU	103	5	WONGKADITI			212		
		3	LIMBA U I	71	6	WONGKADITI BARAT			51		
		4	LIMBA U II	50	JUMLAH				675		
JUMLAH			260	JUMLAH TOTAL		2243					

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN I.B : KABUPATEN GORONTALO

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JML KPM	NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JML KPM				
1	ASPARAGA	1	BIHE	74	6	BOLIYOHUTO	1	BANDUNG REJO	41		
		2	BONTULA	75			2	BONGONGOAYU	38		
		3	BULULI	124			3	DILONIYOHU	42		
		4	KARYA BARU	52			4	DULOHUPA	40		
		5	KARYA INDAH	70			5	ILOHELUMA	41		
		6	MOHIYOLO	71			6	MONGGOLITO	44		
		7	OLIMOHULO	51			7	MOTODUTO	44		
		8	PANGAHU	41			8	PARUNGI	46		
		9	PRIMA	85			9	POTANGA	40		
		10	TIOHU	87			10	SIDO MULYO	46		
JUMLAH			730	JUMLAH			560				
2	BATUDAA	1	BARAKATI	84	7	BONGOMEME	1	BATU LORENG	107		
		2	BUA	87			2	BATULAYAR	113		
		3	DUNGGALA	86			3	BONGOHULAWA	133		
		4	HUNTU	64			4	DULAMAYO	98		
		5	ILOHUNGAYO	45			5	HUNTULOHULAWA	49		
		6	ILUTA	78			6	KAYUMERAH	74		
		7	PAYUNGA	95			7	LIYODU	59		
		8	PILOBUHUTA	83			8	LIYOTO	111		
JUMLAH			622	JUMLAH			1529				
3	BATUDAA PANTAI	1	BILUHU TIMUR	117	8	DUNGALIYO	1	AMBARA	118		
		2	BONGO	65			2	AYUHULA	92		
		3	BUHUDAA	105			3	BONGOMEME	78		
		4	KAYUBULAN	184			4	BOTUBULOWE	139		
		5	LAMU	97			5	DUNGALIYO	86		
		6	LANGGULA	41			6	DUWANGA	85		
		7	LOPO	39			7	KALIYOSO	84		
		8	OLIMOO'O	52			8	MOMALA	83		
		9	TONTAYUO	65			9	PANGADAA	86		
JUMLAH			765	JUMLAH			917				
4	BILATO	1	BILATO	51	8	DUNGALIYO	10	PILOLALENGA	66		
		2	BUMELA	38			JUMLAH			917	
		3	ILOMATA	54			5	BILUHU	1	BILUHU BARAT	121
		4	JURIYA	56					2	BILUHU TENGAH	94
		5	LAMAHU	45					3	BOTUBOLU'O	56
		6	MUSYAWARAH	40					4	HUWONGO	85
		7	PELEHU	57					5	LOBUTO	121
		8	SUKA DAMAI	66					6	LOBUTO TIMUR	68
		9	TAULAA	62					7	LULUO	51
		10	TOTOPO	53					8	OLIMEYALA	61
JUMLAH			522	JUMLAH			657				
JUMLAH			765	JUMLAH			1529				

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

LAMPIRAN I.B : KABUPATEN GORONTALO

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JML KPM	NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JML KPM				
9	LIMBOTO	1	BIYONGA	85	13	TABONGO	1	ILOMANGGA	105		
		2	BOLIHUANGGA	103			2	LIMEHE BARAT	59		
		3	BONGOHULAWA	49			3	LIMEHE TIMUR	171		
		4	BULOTA	95			4	LIMEHU	78		
		5	DUTULANAA	59			5	MOAHUDU	43		
		6	HEPUHULAWA	86			6	MOTINELO	41		
		7	HUNGGALUWA	72			7	TABONGO BARAT	57		
		8	HUTUO	74			8	TABONGO TIMUR	151		
		9	KAYUBULAN	87			9	TERATAI	47		
		10	KAYUMERAH	43			JUMLAH		752		
		11	MALAHU	61			14	TELAGA	1	BULILA	76
		12	POLOHUNGO	68					2	DOLUHUPA	48
		13	TENILO	87					3	DULAMAYO BARAT	87
		14	TILIHUWA	89					4	DULAMAYO SELATAN	90
JUMLAH		1058	5	HULAWA	74						
10	LIMBOTO BARAT	1	DAENAA	102	6	LUHU			86		
		2	HAYA-HAYA	120	7	MONGOLATO			71		
		3	HUIDU	82	8	PILOHAYANGA			82		
		4	HUIDU UTARA	96	9	PILOHAYANGA BARAT			60		
		5	HUTABOHU	120	JUMLAH				674		
		6	OMBULO	109	15	TELAGA BIRU	1	DULAMAYO UTARA	75		
		7	PADENGO	93			2	DUMATI	68		
		8	PONE	98			3	LUPOYO	73		
		9	TUNGGULO	89			4	MODELLIDU	78		
		10	YOOSONEGORO	73			5	PANTUNGO	62		
JUMLAH		982	6	PENTADIO BARAT			90				
11	MOOTILANGO	1	HELUMO	58			7	PENTADIO TIMUR	69		
		2	HUYULA	45			8	TALUMELITO	95		
		3	KARYA MUKTI	23			9	TAPALULUO	56		
		4	PARIS	43			10	TIMUATO	81		
		5	PAYU	37	11	TINELO	47				
		6	PILOMONU	45	12	TONALA	83				
		7	SATRIA	44	13	TULADENGGI	70				
		8	SIDO MUKTI	28	14	ULAPATO.A	96				
		9	SUKA MAJU	37	15	ULAPATO.B	98				
		10	TALUMOPATU	19	JUMLAH		1141				
12	PULUBALA	JUMLAH		379	16	TELAGA JAYA	1	BUHU	173		
		1	AYUMOLINGO	70			2	BULOTA	93		
		2	BAKTI	95			3	BUNGGALO	60		
		3	BUKIT AREN	46			4	HUTADAA	209		
		4	MOLALAHU	97			5	LUWOO	60		
		5	MOLAMAHU	87			JUMLAH		595		
		6	MULYONEGORO	99	16	TELAGA JAYA	6	MULYONEGORO	99		
		7	PONGONGAILA	88			7	PONGONGAILA	88		
		8	PULUBALA	43			8	PULUBALA	43		
		9	PUNCAK	98			9	PUNCAK	98		
		10	TOYDITO	98			10	TOYDITO	98		
		11	TRIDARMA	62			11	TRIDARMA	62		
		12	UPT AYUMOLINGO	2			12	UPT AYUMOLINGO	2		
JUMLAH		885									

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

LAMPIRAN I.B : KABUPATEN GORONTALO

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JML KPM	
17	TIBAWA	1	BALAHU	46
		2	BOTUMOPUTI	107
		3	BUHU	98
		4	DATAHU	104
		5	DUNGGALA	90
		6	ILOMATA	145
		7	ILOPONU	136
		8	ISIMU RAYA	86
		9	ISIMU SELATAN	48
		10	ISIMU UTARA	136
		11	LABANU	105
		12	MOLOWAHU	82
		13	MOTILANGO	42
		14	REKSONEGORO	44
		15	TOLOTIO	48
				16
JUMLAH			1439	
18	TILANGO	1	DULOMO	37
		2	ILOTIDEA	150
		3	LAUWONU	110
		4	TABUMELA	174
		5	TENGGELA	168
		6	TILOTE	69
		7	TINELO	75
		8	TUALANGO	68
JUMLAH			851	
19	TOLANGOHULA	1	BINA JAYA	42
		2	GANDARIA	50
		3	GANDASARI	50
		4	HIMALAYA	39
		5	LAKEYA	42
		6	MAKMUR ABADI	45
		7	MARGOMULYA	41
		8	MOLOHU	39
		9	OMBULO TANGO	41
		10	POLOHUNGO	43
		11	SIDOARJO	31
		12	SUKAMAKMUR	42
		13	SUKAMAKMUR UTARA	30
		14	TAMAILA	49
		15	TAMAILA UTARA	35
JUMLAH			619	
JUMLAH TOTAL			15677	

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN 1.C : KABUPATEN BOALEMO

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JML KPM	NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JML KPM		
1	BOTUMOITO	1	BOLIHUTUO	58	5	PAGUYAMAN PANTAI	1	APITALAWU	61
		2	BOTUMOITO	56			2	BANGGA	57
		3	DULANGEYA	61			3	BUBAA	58
		4	HUTAMONU	57			4	BUKIT KARYA	57
		5	PATOAMEME	60			5	LIMBATIHU	63
		6	POTANGA	57			6	LITO	55
		7	RUMBIA	47			7	OLIBU	60
		8	TAPADAA	60			8	TOWAYU	55
				9			TUTULO	55	
		JUMLAH		511			1	AYUHULALO	99
2	DULUPI	1	DULUPI	55	6	TILAMUTA	2	BAJO	113
		2	KOTARAJA	62			3	HUNGAYONAA	80
		3	PANGI	52			4	LAHUMBO	101
		4	POLOHUNGO	60			5	LAMU	86
		5	TABONGO	54			6	LIMBATO	59
		6	TANAH PUTIH	53			7	MODELOMO	60
		7	TANGGA BARITO	58			8	MOHUNGO	114
		8	TANGGA JAYA	57			9	PENTADU BARAT	114
		JUMLAH		451			10	PENTADU TIMUR	108
3	MANANGGU	1	BENDUNGAN	47	7	WONOSARI	11	PILOLIYANGA	116
		2	BUTI	39			12	TENILO	69
		3	HARAPAN	1			JUMLAH		1119
		4	KAARUYAN	38			1	DIMITO	60
		5	KERAMAT	59			2	DULOHUPA	59
		6	MANANGGU	56			3	HARAPAN	39
		7	PILOLIYANGA	1			4	JATI MULYA	36
		8	PONTOLO	48			5	MEKAR JAYA	51
		9	RUMBIA	1			6	PANGEA	52
		10	SALILAMA	53			7	RAHARJA	61
		11	TABULO	48			8	SARI TANI	59
		12	TABULO SELATAN	54			9	SUKA MAJU	55
		JUMLAH		445			10	SUKA MULIA	48
4	PAGUYAMAN	1	BALATE JAYA	58			11	TANJUNG HARAPAN	53
		2	BATU KRAMAT	57			12	TRI RUKUN	59
		3	BONGO NOL	54	JUMLAH		632		
		4	BONGO TUA	58	JUMLAH TOTAL		4870		
		5	BUALO	56					
		6	DILATO	60					
		7	GIRISA	61					
		8	HULAWA	44					
		9	HUWONGO	50					
		10	KARYA MURNI	46					
		11	KUALA LUMPUR	61					
		12	MOLOMBULAHE	86					
		13	MUSTIKA	52					
		14	MUTIARA	58					
		15	PERMATA	56					
		16	REJONEGORO	49					
		17	SARIPI	54					
		18	SOSIAL	59					
		19	SUMBER JAYA	58					
		20	TANGKOBU	51					
		21	TENILO	58					
		22	WONGGAHU	60					
		JUMLAH		1246					

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN 1.D : KABUPATEN POHUWATO

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JML KPM	NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JML KPM		
1	BUNTULIA	1	BUNTULIA TENGAH	22	8	POPAYATO	1	BUKIT TINGKI	7
		2	BUNTULIA UTARA	17			2	BUMI BAHARI	4
		3	HULAWA	34			3	DAMBALO	18
		4	KARYA INDAH	5			4	POPAYATO	8
		5	SIPATANA	4			5	TELAGA	15
		6	TALUDUYUNU	11			6	TELAGA BIRU	13
		7	TALUDUYUNU UTARA	21			7	TOROSIAJE	54
JUMLAH			114	8			TOROSIAJE JAYA	52	
2	DENGILO	1	HUTAMOPUTI	18			9	TRIKORA	3
		2	KARANGETAN	2			10	TUNAS HARAPAN	18
		3	KARYA BARU	27	JUMLAH			192	
		4	PADENGO	21	9	POPAYATO BARA	1	BUTUNGALE	12
		5	POPAYA	20			2	DUDEWULO	17
JUMLAH			88	3			MOLOSIPAT	29	
3	DUHIADAA	1	BILILI	38			4	MOLOSIPAT UTARA	35
		2	BUNTULIA BARAT	28			5	PADENGO	7
		3	BUNTULIA JAYA	10			6	PERSATUAN	25
		4	BUNTULIA SELATAN	11			7	TUNAS JAYA	1
		5	DUHIADAA	8	JUMLAH			126	
		6	MEKAR JAYA	24	10	POPAYATO TIMU	1	BUNTO	8
		7	MOOTILANGO	19			2	KELAPA LIMA	5
		8	PADENGO	5			3	LONDOUN	21
JUMLAH			143	4			MALEO	10	
4	LEMITO	1	BALOBALONGE	15			5	MARISA	25
		2	KENARI	28			6	MILANGODAA	12
		3	LEMITO	45			7	TAHELE	25
		4	LEMITO UTARA	28	JUMLAH			106	
		5	LOMULI	17	11	RANDANGAN	1	AYULA	16
		6	SUKA DAMAI	12			2	BANUROJA	4
		7	WONGGARASI BARAT	31			3	HUYULA	9
		8	WONGGARASI TENGAH	60			4	IMBODU	7
JUMLAH			236	5			MANUNGGAL KARYA	14	
5	MARISA	1	BOTUBILOTAHU INDAH	16			6	MOTOLOHU	8
		2	BULANGITA	19			7	MOTOLOHU SELATAN	10
		3	MARISA SELATAN	20			8	OMAYUWA	14
		4	MARISA UTARA	11			9	PATUHU	13
		5	PALOPO	26			10	PELAMBANE	7
		6	POHUWATO	21			11	SARI MURNI	4
		7	POHUWATO TIMUR	42			12	SIDORUKUN	15
		8	TERATAI	25			13	SIDUWONGE	9
JUMLAH			180	JUMLAH			130		
6	PAGUAT	1	BUHU JAYA	43	12	TALUDITI	1	KALIMAS	5
		2	BUMBULAN	30			2	MALANGO	9
		3	BUNUYO	43			3	MEKARTI JAYA	10
		4	KEMIRI	32			4	PANCA KARSA I	17
		5	LIBUO	27			5	PANCA KARSA II	6
		6	MALEO	31			6	PUNCAK JAYA	20
		7	MOLAMAHU	24			7	TIRTO ASRI	17
		8	PENTADU	44			8	UPT MARISA VB	12
		9	SIDUAN	30	JUMLAH			96	
		10	SIPAYO	36	13	WANGGARASI	1	BOHUSAMI	7
		11	SOGINTI	38			2	BUKIT HARAPAN	6
JUMLAH			378	3			LEMBAH PERMAI	4	
7	PATILANGGIO	1	BALAYO	27			4	LIMBULA	17
		2	DUDEPO	13			5	TUWEYA	10
		3	DULOMO	21			6	WANGGARASI TIMUR	11
		4	ILO HELUMO	23			7	YIPILO	13
		5	MANAWA	39	JUMLAH			68	
		6	SUKA MAKMUR	18	JUMLAH TOTAL			1998	
JUMLAH			141						

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

LAMPIRAN 1.E : KABUPATEN BONE BOLANGO

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JML KPM	NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JML KPM			
1	BONE	1	BILOLANTUNGA	16	8	KABILA	1	DUTOHE	42	
		2	CENDANA PUTIH	11			2	DUTOHE BARAT	65	
		3	ILOHUUWA	14			3	OLUHUTA	23	
		4	INOGALUMA	18			4	OLUHUTA UTARA	15	
		5	MASIAGA	14			5	PADENGO	42	
		6	MOLAMAHU	16			6	PAUWO	52	
		7	MONANO	11			7	POOWO	56	
		8	MOODULIO	14			8	POOWO BARAT	27	
		9	MUARA BONE	6			9	TALANGO	26	
		10	PERMATA	10			10	TANGGILINGO	49	
		11	SOGITIA	23			11	TOTO SELATAN	49	
		12	TALUDAA	18			12	TUMBIHE	32	
		13	TUMBUH MEKAR	9					JUMLAH	478
		14	WALAHU	8						
		JUMLAH	188							
2	BONE RAYA	1	ALO	29	9	KABILA BONE	1	BILUANGO	35	
		2	BUNGA	35			2	BINTALAE	19	
		3	INOMATA	32			3	BOTUBARANI	28	
		4	LAUT BIRU	33			4	BOTUTONUO	39	
		5	MOOPIYA	27			5	HUANGOBOTU	46	
		6	MOOTAWA	12			6	MODELOMO	36	
		7	MOOTAYU	5			7	MOLOTABU	67	
		8	MOOTINELO	12			8	OLELE	56	
		9	TOMBULILATO	17			9	OLUHUTA	86	
		JUMLAH	202			JUMLAH	412			
3	BOTU PINGGE	1	BUATA	34	10	SUWAWA	1	BOLUDAWA	103	
		2	LUWOHU	10			2	BUBE	21	
		3	PANGGULO	33			3	BUBE BARU	86	
		4	PANGGULO BARAT	21			4	BUBEYA	65	
		5	SUKMA	3			5	HELUMO	24	
		6	TANAH PUTIH	30			6	HULUDUOTAMO	39	
		7	TIMBUOLO	22			7	TINELO	112	
		8	TIMBUOLO TENGAH	21			8	TINGKOHUBU	48	
		9	TIMBUOLO TIMUR	33			9	TINGKOHUBU TIMUR	31	
		JUMLAH	207			JUMLAH	602			
4	BULANGO SELATAN	1	AYUHULA SELATAN	18	11	SUWAWA SELATAN	1	BONDA RAYA	44	
		2	AYUHULA TILANGO	28			2	BONDAWUNA	48	
		3	AYUHULA TIMUR	12			3	BONEDAA	58	
		4	AYUHULA UTARA	26			4	BULONTALA	33	
		5	HUNTU BARAT	35			5	BULONTALA TIMUR	61	
		6	HUNTU SELATAN	21			6	LIBUNGO	29	
		7	HUNTU UTARA	27			7	MOLINTOGUPO	103	
		8	LAMAHU	25			8	PANCURAN	31	
		9	SEJAHTERA	19					JUMLAH	407
		JUMLAH	211							
5	BULANGO TIMUR	1	BULONTALANGI	47	12	SUWAWA TENGAH	1	ALALE	21	
		2	BULONTALANGI BARA	52			2	DUANO	45	
		3	BULONTALANGI TIMU	45			3	LOMBONGO	52	
		4	POPODU	44			4	LOMPOTOO	27	
		5	TOLUWAYA	17			5	TAPADAA	35	
		JUMLAH	205			JUMLAH	209			
6	BULANGO ULU	1	ILOMATA	37	13	TAPA	1	DUNGGALA	45	
		2	MONGILO	65			2	KRAMAT	16	
		3	MONILO UTARA	57			3	LANGGE	34	
		4	OWATA	74			4	MERANTI	36	
		5	PILOLAHEYA	43			5	TALULOBUTU	26	
		6	SUKA MAKMUR	41			6	TALULOBUTU SELATAN	17	
		JUMLAH	317			JUMLAH	206			
7	BULANGO UTARA	1	BANDUNGAN	32	14	TILONGKABILA	1	BERLIAN	16	
		2	BOIDU	13			2	BONGOHULAWA	41	
		3	BUNUO	14			3	BONGOIME	96	
		4	KOPI	15			4	BONGOPINI	27	
		5	LOMAYA	32			5	BUTU	53	
		6	LONGALO	30			6	ILOHELUMA	61	
		7	SUKA DAMAI	19			7	LONUO	61	
		8	TULOAA	32			8	MOTILANGO	80	
		9	TUPA	16			9	MOUTONG	36	
		JUMLAH	203			JUMLAH	794			
						JUMLAH TOTAL	4641			

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

DAFTAR ALOKASI BANTUAN LANGSUNG BAHAN PANGAN DAERAH DAN BIAYA DISTRIBUSI SE PROVINSI GORONTALO								Lampiran 1.G
NO	KABUPATEN/KOTA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH PENERIMA	NILAI BANTUAN/ PELAYAN	VOLUME LAYANAN (KALI)	JUMLAH BANTUAN
A	PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO							
1	Beras	5	Kg.					
2	Telur	1	Bag					
3	Minyak Goreng Kemasan	1	liter					
4	Ikan Olahan/Segar	1	Pack/Kg.					
5	Gula Semut	250	Gr					
6	Biaya Distribusi	1	Pack/Kg.					
7	Biaya Kemasan/Packing	1	Pck					
	SUB TOTAL PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO			178.150	32.051	5.709.885.650	3	17.129.656.950
B	KABUPATEN/KOTA							
I	KOTA GORONTALO							
1	Beras	5	Kg.					
2	Telur	1	Bag					
3	Minyak Goreng Kemasan	1	liter					
4	Ikan Olahan/Segar	1	Pack/Kg.					
5	Gula Semut	250	Gr					
6	Biaya Distribusi	1	Pack/Kg.					
7	Biaya Kemasan/Packing	1	Pck					
	SUB TOTAL KOTA GTLO			178.150	1.495	266.334.250	3	799.002.750
II	KABUPATEN GORONTALO							
1	Beras	5	Kg.					
2	Telur	1	Bag					
3	Minyak Goreng Kemasan	1	liter					
4	Ikan Olahan/Segar	1	Pack/Kg.					
5	Gula Semut	250	Gr					
6	Biaya Distribusi	1	Pack/Kg.					
7	Biaya Kemasan/Packing	1	Pck					
	SUB TOTAL KAB GORONTALO			178.150	10.451	1.861.845.650	3	5.585.536.950
III	KABUPATEN BOALEMO							
1	Beras	5	Kg.					
2	Telur	1	Bag					
3	Minyak Goreng Kemasan	1	liter					
4	Ikan Olahan/Segar	1	Pack/Kg.					
5	Gula Semut	250	Gr					
6	Biaya Distribusi	1	Pack/Kg.					
7	Biaya Kemasan/Packing	1	Pck					
	SUB TOTAL KAB BOALEMO			178.150	3.247	578.453.050	3	1.735.359.150
IV	KABUPATEN BONE BOLANGO							
1	Beras	5	Kg.					
2	Telur	1	Bag					
3	Minyak Goreng Kemasan	1	liter					
4	Ikan Olahan/Segar	1	Pack/Kg.					
5	Gula Semut	250	Gr					
6	Biaya Distribusi	1	Pack/Kg.					
7	Biaya Kemasan/Packing	1	Pck					
	SUB TOTAL KAB BONE BOLANGO			178.150	3.094	551.196.100	3	1.653.588.300
V	KABUPATEN POHUWATO							
1	Beras	5	Kg.					
2	Telur	1	Bag					
3	Minyak Goreng Kemasan	1	liter					
4	Ikan Olahan/Segar	1	Pack/Kg.					
5	Gula Semut	250	Gr					
6	Biaya Distribusi	1	Pack/Kg.					
7	Biaya Kemasan/Packing	1	Pck					
	SUB TOTAL KAB POHUWATO			178.150	1.332	237.295.800	3	711.887.400
VI	KABUPATEN GORONTALO UTARA							
1	Beras	5	Kg.					
2	Telur	1	Bag					
3	Minyak Goreng Kemasan	1	liter					
4	Ikan Olahan/Segar	1	Pack/Kg.					
5	Gula Semut	250	Gr					
6	Biaya Distribusi	1	Pack/Kg.					
7	Biaya Kemasan/Packing	1	Pck					
	SUB TOTAL KAB GORONTALO UTARA			178.150	1.748	311.406.200	3	934.218.600
	SUB TOTAL KABUPATEN/KOTA							11.419.593.150
	TOTAL							28.549.250.100



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo